

Pemerintah Siap Bebaskan Lahan Tol Cisumdawu

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap mengambil alih proses pembebasan lahan seluruh ruas tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Namun, kebijakan itu bisa dilakukan apabila biaya pembebasan lahan sudah tersedia.

"Kami tidak keberatan jika proses pembebasan lahan untuk tol itu diambil alih semuanya asalkan ada biayanya. Toh, hal ini, manfaatnya juga akan kembali kepada masyarakat, bukan swasta," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Jakarta, pekan lalu.

Dia menjelaskan, pengambilalihan proses pembebasan lahan bisa dilakukan apabila PT Jasa Sarana, sebagai pihak yang ditugasi pemerintah daerah melakukan tugas tersebut, tidak maksimal menjalankan kewajibannya. Akibatnya, proses pembangunan jalan bebas hambatan yang dibiayai dari pinjaman Pemerintah Tiongkok akan terhambat, sehingga mengganggu kelanjutan proyek.

"Namun begitu, saat ini kami fokus

untuk menyelesaikan pembangunan tol di pantai utara atau Trans Jawa," tambah Djoko.

Pemerintah saat ini membangun tol Cisumdawu seksi I dan II sejak November 2012. Kedua seksi tol yang dikerjakan oleh Shanghai Contractor Group, PT Wijaya Karya Tbk, dan PT Waskita Karya tersebut diharapkan dapat tuntas pada 2014.

Pengerjaan proyek tol Cisumdawu terbagi menjadi enam seksi. Seksi tersebut adalah seksi I Cileunyi-Tanjungsari (9,8 km), seksi II Tanjungsari-Sumedang (17,51 km), seksi III Sumedang-Cimalaka (3,7 km), seksi IV Cimalaka-Legok (6,96 km), seksi V Legok-Ujungjaya (16,35 km), dan seksi VI Ujungjaya-Dawuan (4 km).

Kepala Seksi Pengadaan Tanah Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Sri Sadono sebelumnya mengungkapkan, total lahan yang mesti dibebaskan untuk seluruh seksi tol Cisumdawu mencapai 1.140 hek-

tare (ha). Luas lahan yang mesti dibebaskan tersebut meningkat dari sebelumnya hanya 850 ha, karena perubahan akses, penguatan jalan di lereng bukit, serta pengerukan lahan.

"Asumsi kebutuhan biaya untuk pembebasan lahan sekitar Rp 1,4 triliun. Jumlah ini bisa bertambah ataupun berkurang, bergantung dari proses negosiasi di lapangan dengan masyarakat," ungkap dia.

Dari total kebutuhan biaya pembebasan lahan itu, lanjut dia, yang sudah direalisasikan sekitar Rp 218 miliar untuk membayar ganti rugi lahan di seksi I dan II. Terkait sumber pendanaan, sebagian berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yakni Rp 111 miliar dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebanyak Rp 107 miliar.

"Itu baru pendanaan lahan di seksi I dan II saja. Lahan di seksi-seksi lain belum dibebaskan seluruhnya," imbuh dia. (ean)